



PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN

SISTEM KERJA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2023

ACHMAD FACHRUDDIN, S.IP, M.M.
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

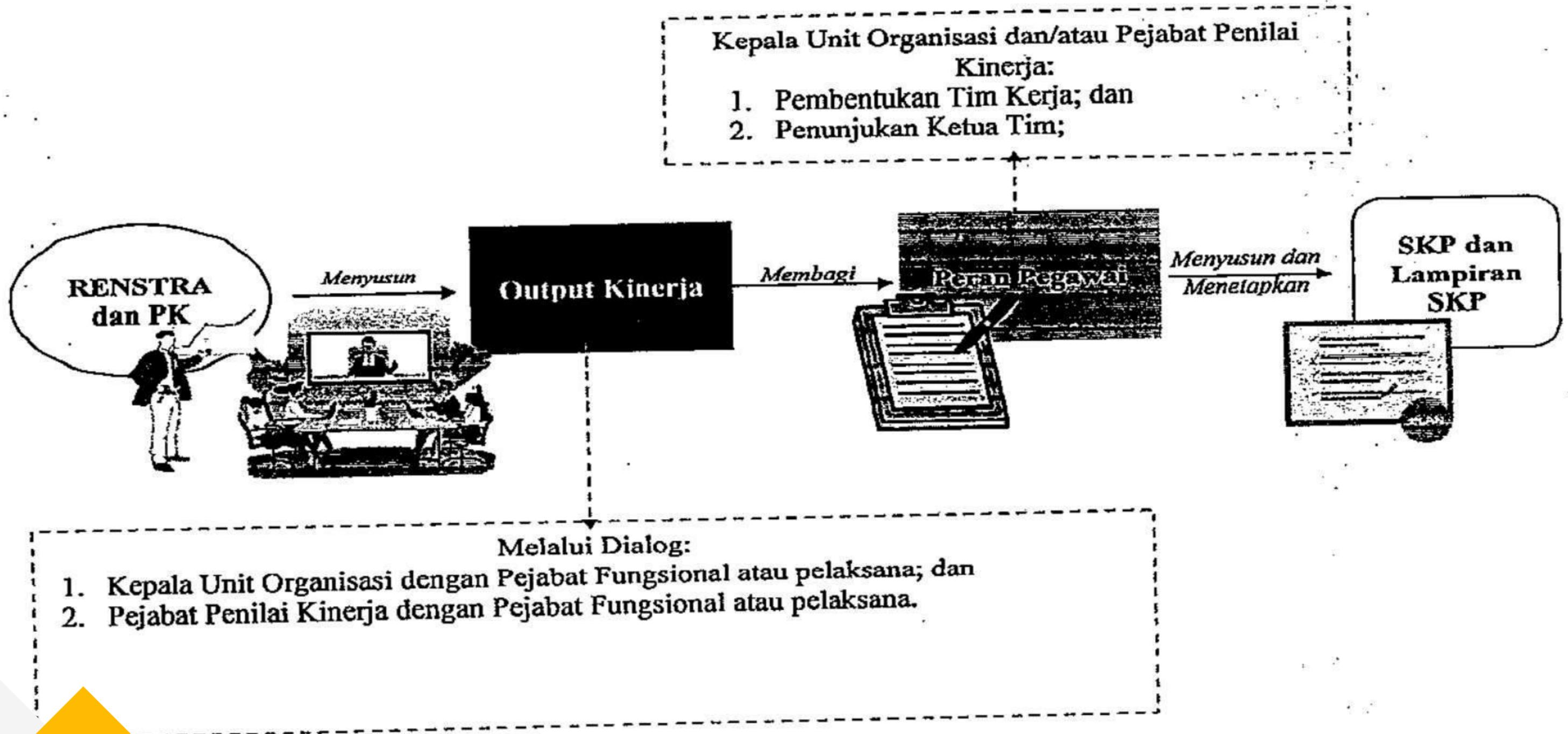


Surat Menteri Dalam Negeri

Nomor : 100.2.2.6/4520/OTDA

Tanggal : 23 Juni 2023

Hal : Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi



LATAR BELAKANG



ARAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO TENTANG REFORMASI BIROKRASI

1

Birokrasi yang **BERDAMPAK** langsung pada masyarakat

2

Reformasi Birokrasi Bukan **TUMPUKAN KERTAS**

3

Birokrasi **LINCAH** dan **CEPAT**





PENYEDERHANAAN BIROKRASI

**PENYEDERHANAAN
STRUKTUR
ORGANISASI**

**PENYETARAAN
JABATAN**

**PENYESUAIAN
SISTEM KERJA**



PENYEDERHANAAN BIROKRASI

PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI

- Penyederhanaan struktur organisasi menjadi 2 level
- Perampingan struktur organisasi Jabatan Administrasi dengan kriteria tertentu dan memperhatikan karakteristik sifat tugas dari JA tersebut

PENYETARAAN JABATAN

PENYESUAIAN SISTEM KERJA



PENYEDERHANAAN BIROKRASI

PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI

PENYETARAAN JABATAN

- Pengalihan Pejabat Administrasi yang organisasinya dirampingkan menjadi pejabat fungsional yang bersesuaian
- Pengembangan Jabatan Fungsional
- Penyetaraan penghasilan

PENYESUAIAN SISTEM KERJA

PENYEDERHANAAN BIROKRASI

PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI

PENYETARAAN JABATAN

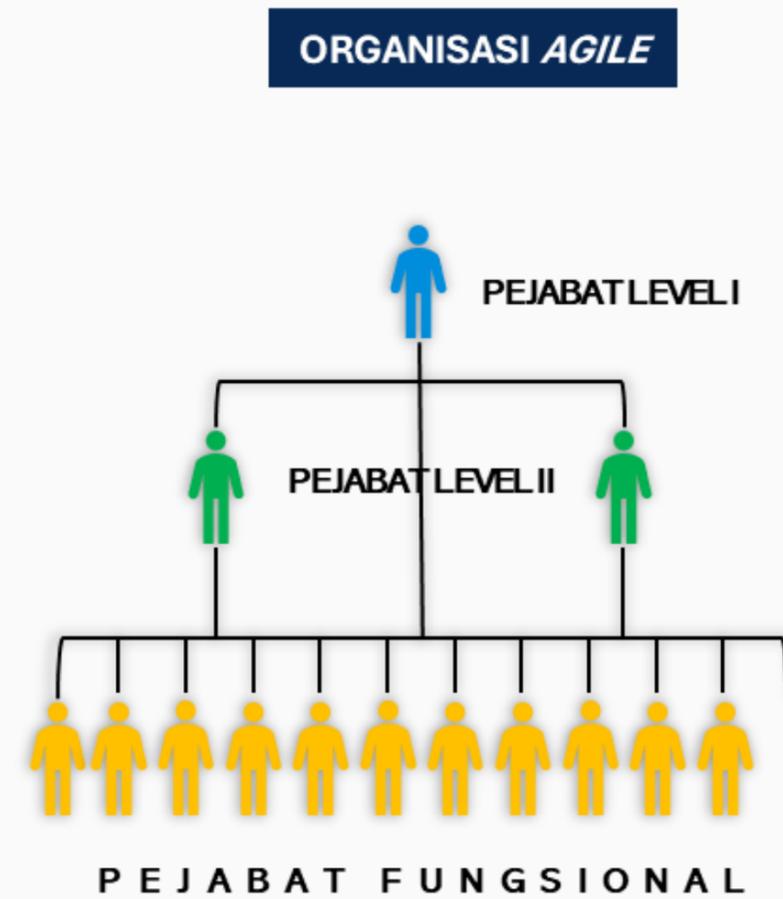
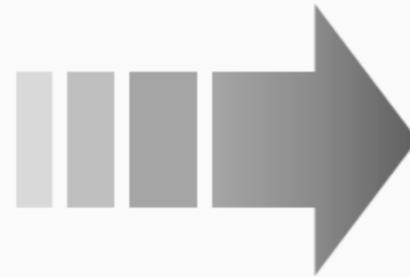
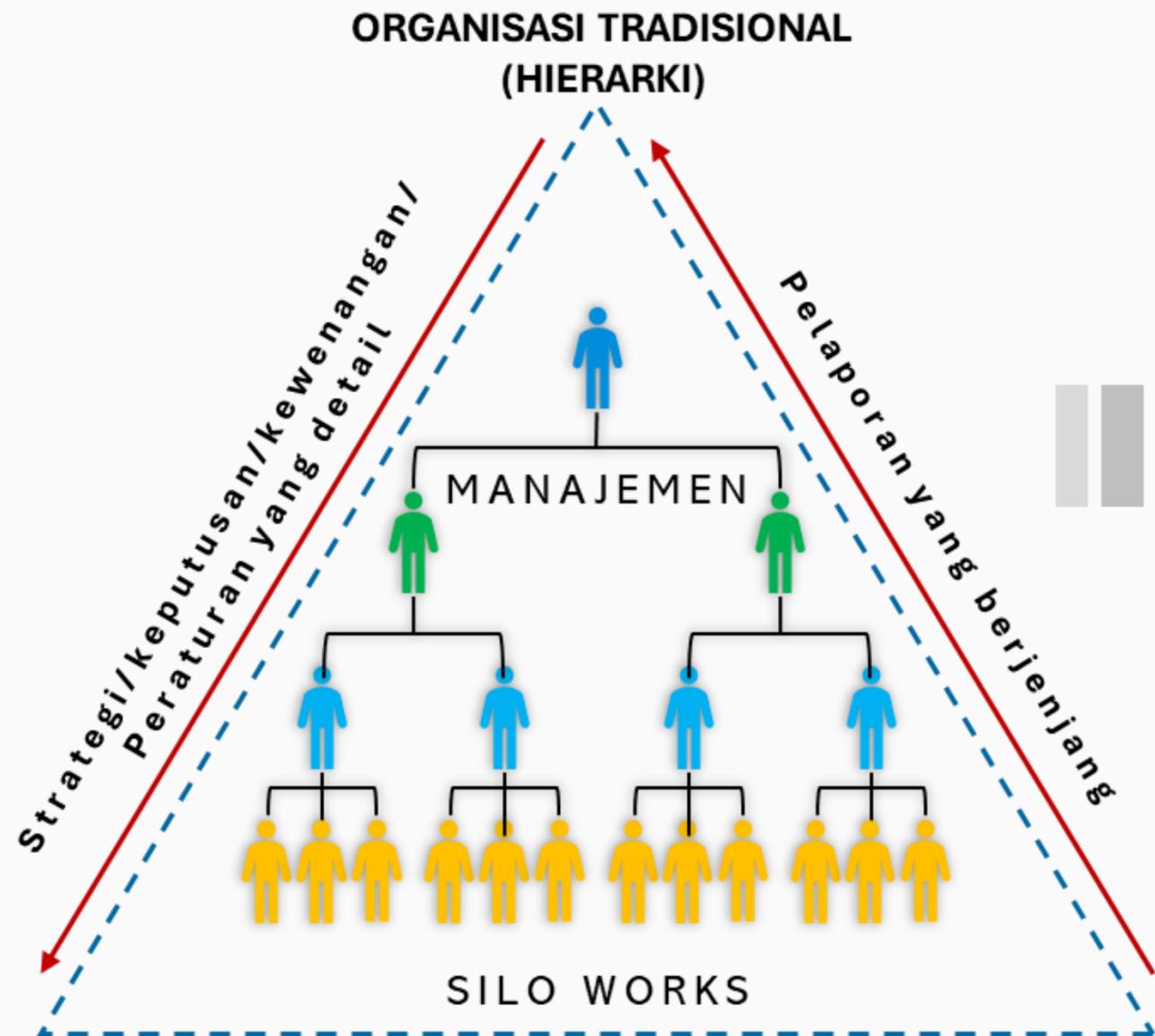
PENYESUAIAN SISTEM KERJA

- Penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik
- Pengembangan sistem kerja berbasis digital

KONSEP SISTEM KERJA



TRANSFORMASI ORGANISASI INSTANSI PEMERINTAH



SEBELUM PENYEDERHANAAN BIROKRASI

Organisasi memiliki 4-5 tingkatan struktur

Pengambilan keputusan memerlukan waktu lama

Ego unit kerja, ego sektoral sangat tinggi (silo-silo)

Pejabat fungsional kurang mendapat apresiasi karier

Orientasi pegawai lebih besar ke jabatan struktural

Pemanfaatan teknologi informasi belum dilakukan secara optimal

PASCA PENYEDERHANAAN BIROKRASI

Organisasi memiliki 2 tingkatan struktur

Pengambilan keputusan dapat cepat dilakukan

Ego sektoral dikurangi, kolaborasi meningkat dan saling menguntungkan

Pejabat fungsional memegang peranan penting dan memiliki karier yang cepat

Orientasi pegawai lebih fokus pada kinerja sebagai motivator karier

Pemanfaatan teknologi informasi dalam seluruh aktivitas pelaksanaan tugas



Perubahan Budaya Kerja





IMPLEMENTASI SISTEM KERJA



DAFTAR ISTILAH



PEJABAT PENILAI KINERJA

ATASAN LANGSUNG DENGAN KETENTUAN PALING RENDAH PEJABAT PENGAWAS ATAU PEJABAT LAIN YANG DIBERI PENDELEGASIAN KEWENANGAN (PEJABAT FUNGSIONAL YANG MEMIMPIN UNIT ORGANISASI. MIS: KEPALA SEKOLAH, KEPALA PUSKESMAS)



KETUA TIM

PEJABAT FUNGSIONAL ATAU PELAKSANA YANG DIBERI PERAN UNTUK MENGOORDINASIKAN. SEBAGAI PEJABAT FUNGSIONAL ATAU PELAKSANA, KETUA TIM TETAP MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI JABATANNYA



PIMPINAN UNIT ORGANISASI

PPT MADYA, PPT PRATAMA, PEJABAT ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS, ATAU PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIANGKAT UNTUK MEMIMPIN SUATU UNIT ORGANISASI



JF DAN PELAKSANA

DAPAT BEKERJA SECARA INDIVIDU ATAU SEBAGAI ANGGOTA TIM, SESUAI DENGAN PERAN YANG DIBERIKAN

DAMPAK SISTEM KERJA

1

Nomenklatur koordinator dan subkoordinator tidak berlaku lagi

2

Pejabat fungsional dan pelaksana menjadi ketua tim

3

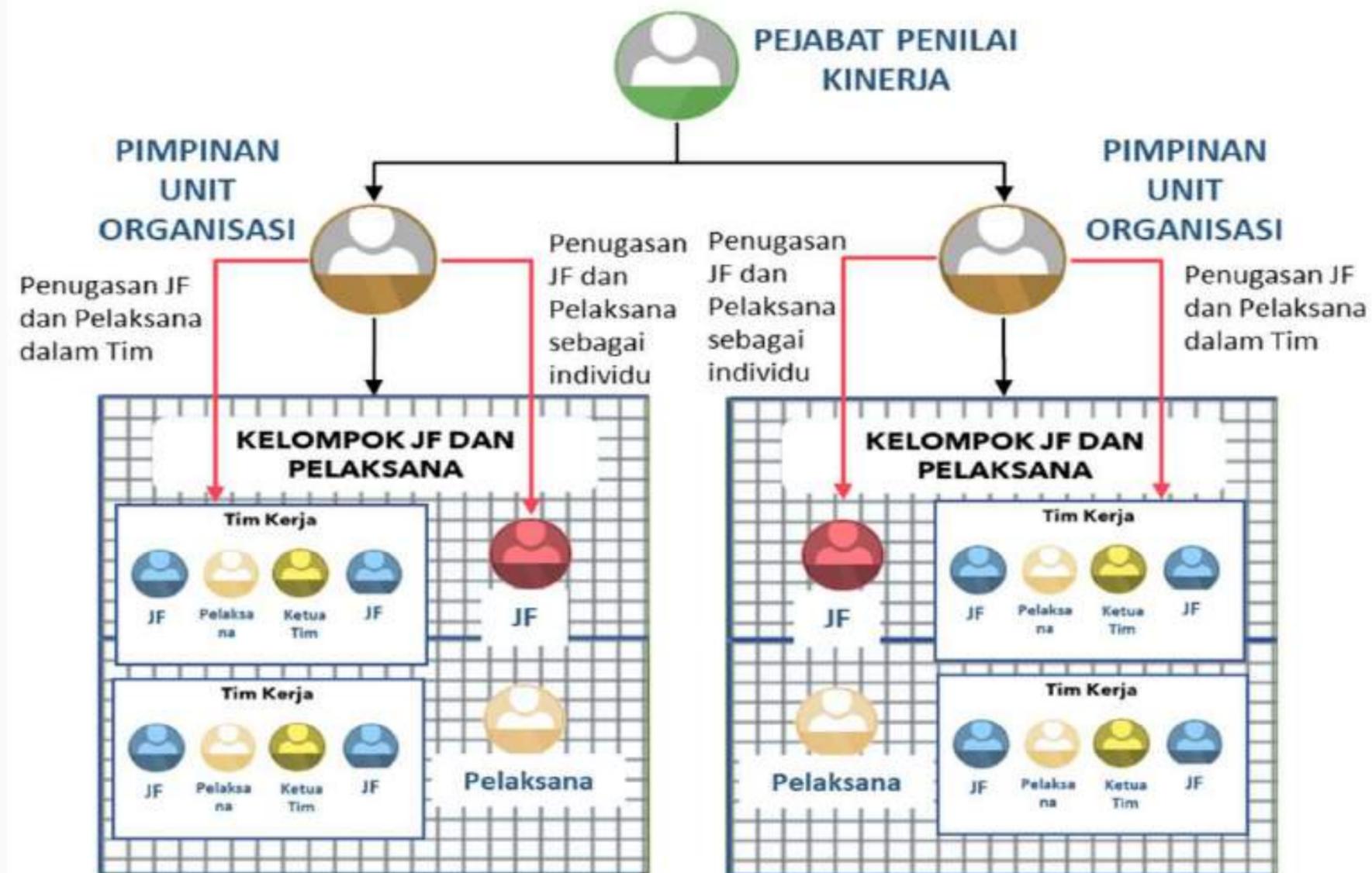
Pejabat pengawas secara otomatis menjadi ketua tim, kecuali yang berada di unit pelaksana teknis



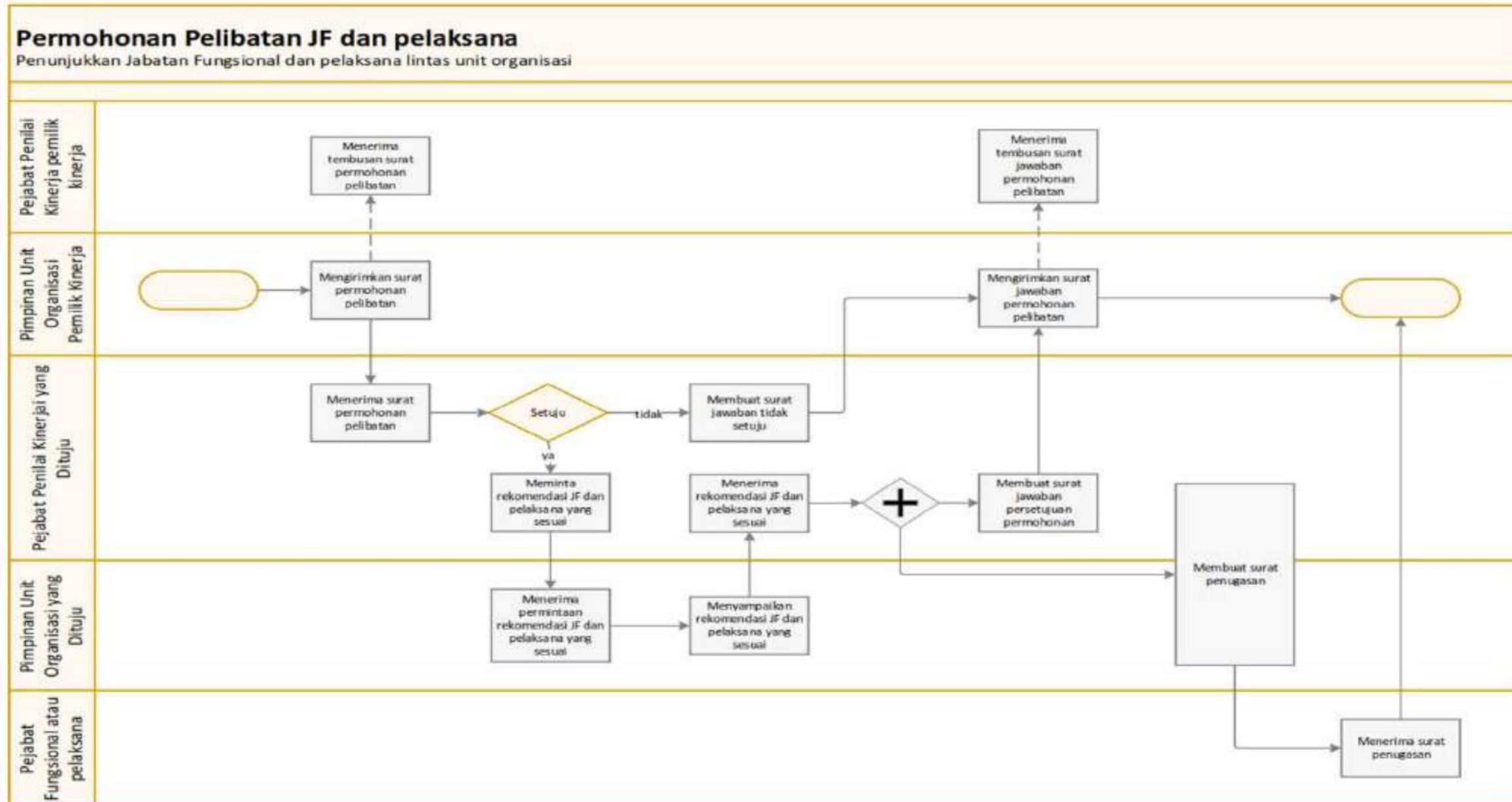
PENUGASAN



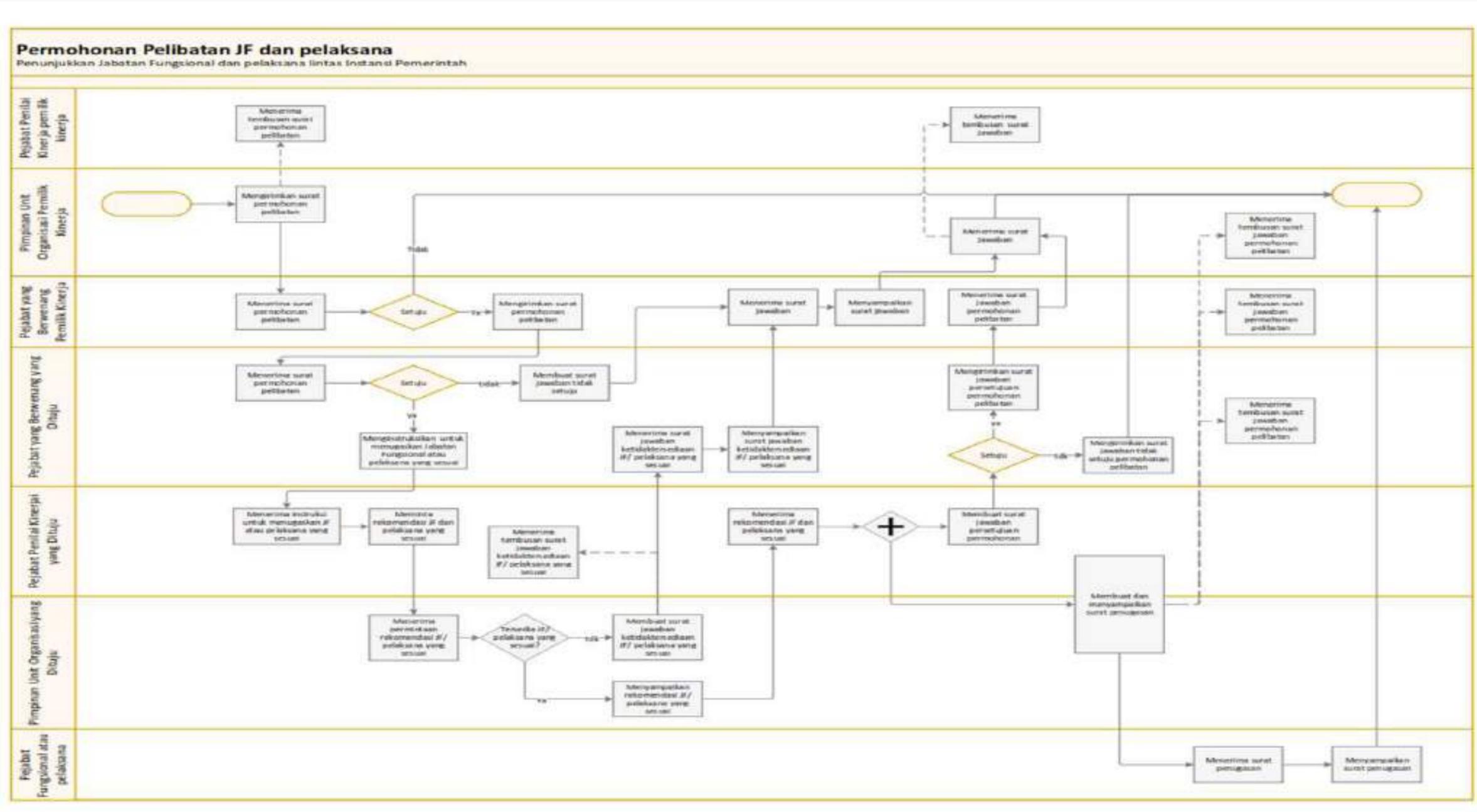
MEKANISME PENUNJUKKAN Di Dalam Unit Organisasi



MEKANISME PENUNJUKAN Lintas Unit Organisasi

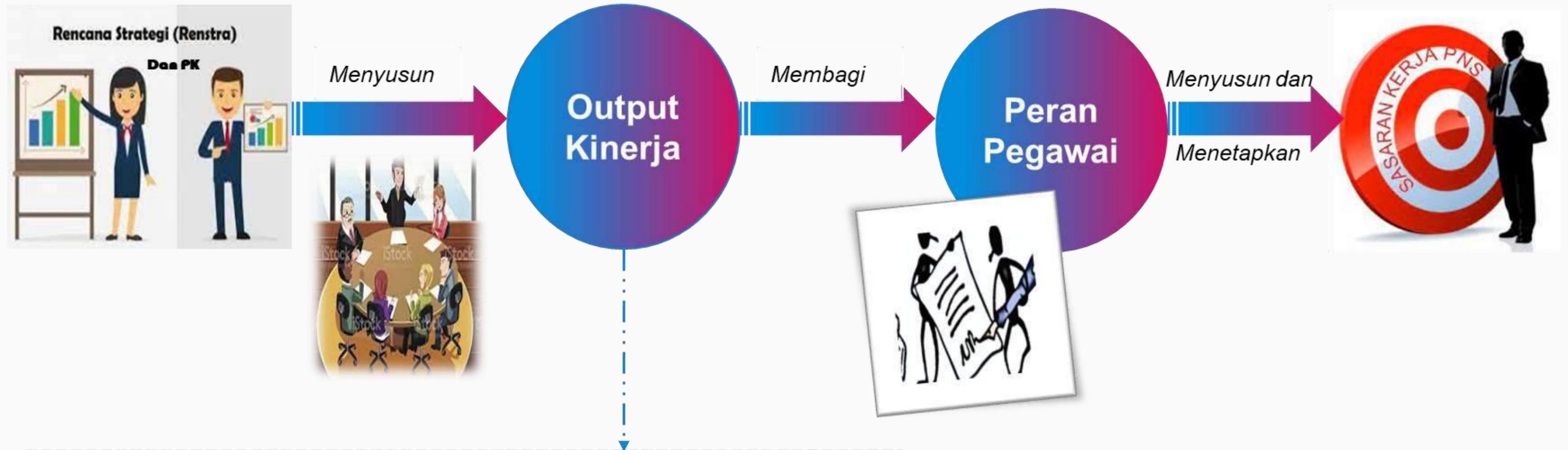


MEKANISME PENUNJUKAN Lintas Instansi Pemerintah





PENUNJUKAN SEBAGAI INDIVIDU



Melalui dialog:

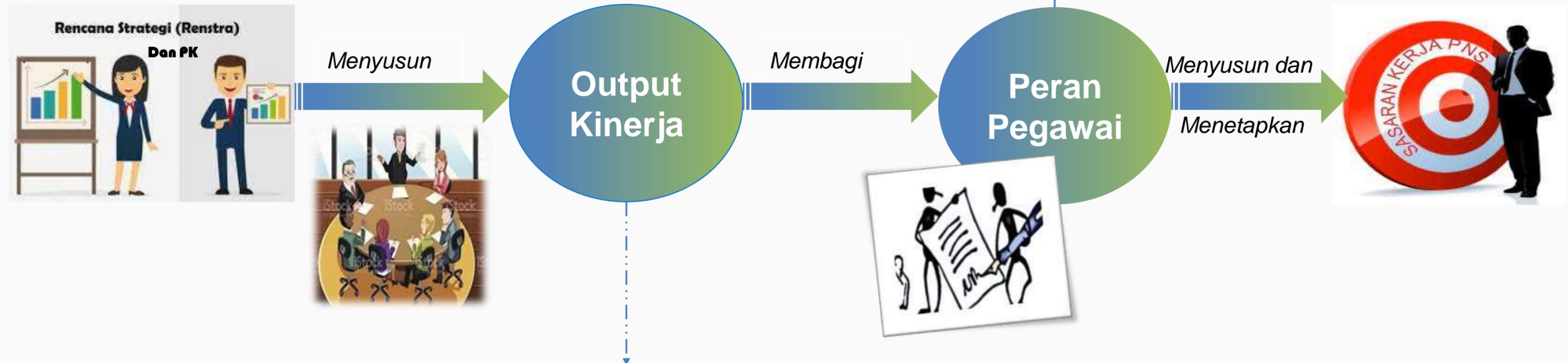
- 1. Pimpinan Unit Organisasi dengan Pejabat Fungsional dan Pelaksana, dan*
- 2. Pejabat Penilai Kinerja dengan Pejabat Fungsional dan Pelaksana.*



PENUNJUKAN SEBAGAI TIM KERJA

Kepala Unit Organisasi dan/atau Pejabat Penilai Kinerja:

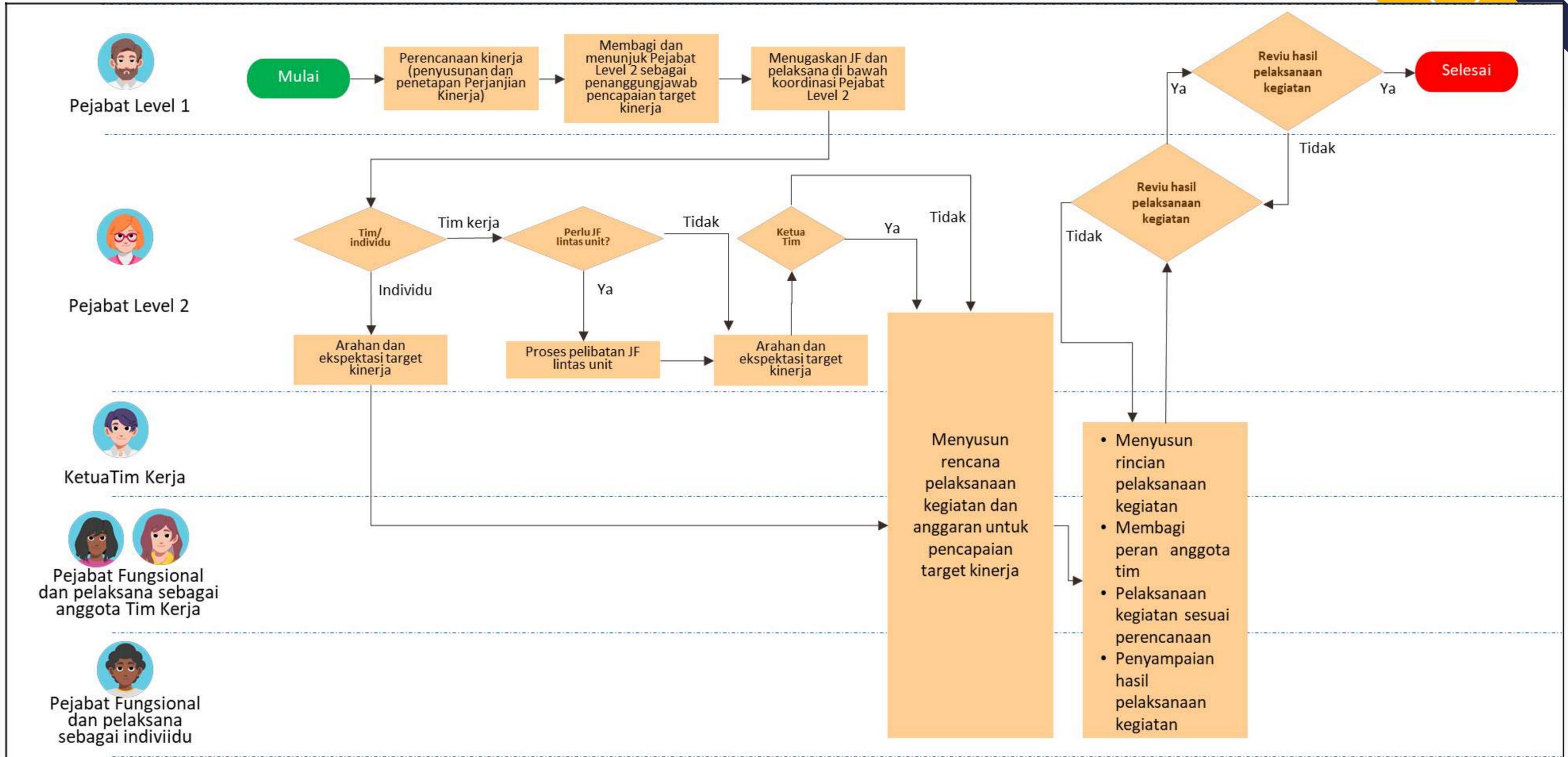
- 1. Pembentukan Tim Kerja, dan*
- 2. Penunjukan Ketua Tim*



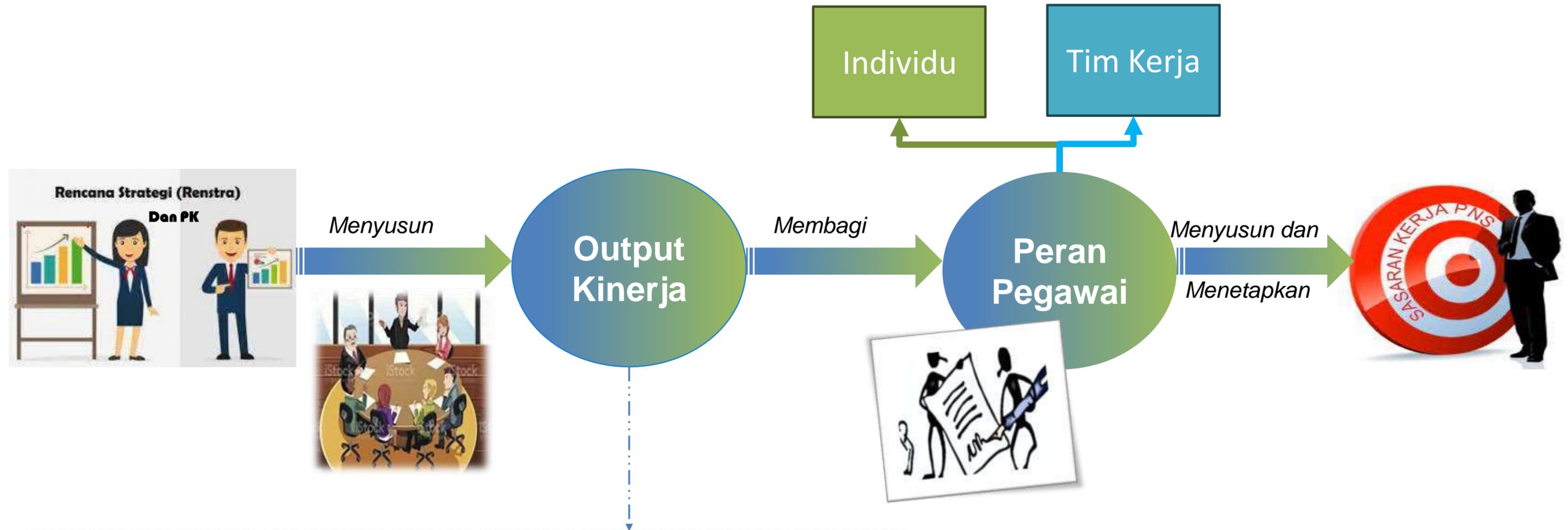
Melalui dialog:

- 1. Pimpinan Unit Organisasi dengan Pejabat Fungsional atau Pelaksana, dan*
- 2. Pejabat Penilai Kinerja dengan Pejabat Fungsional atau Pelaksana.*

MEKANISME KERJA



TAHAPAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA



Melalui dialog:

1. Pimpinan Unit Organisasi dengan Pejabat Fungsional atau Pelaksana, dan
2. Pejabat Penilai Kinerja dengan Pejabat Fungsional atau Pelaksana.

TERIMA KASIH



**Biro Organisasi
Setda Provinsi Sulsel**

